

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
XXI		URUSAN KESEHATAN 1. KEBIJAKAN Kebijakan Teknis Bidang Kesehatan a. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan b. Penyiapan bahan c. Pemberian Masukan dan Dukungan dalam Penyusunan Kebijakan d. Pengumpulan dan pengolahan data e. Penetapan dalam bentuk nspk dan standardisasi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		2. UPAYA KESEHATAN A. Upaya Kesehatan Dasar 1. Pelayanan Kedokteran Keluarga	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		2. Praktik Klinis bagi Dokter di Fanyankes Primer	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		3. Pelaksanaan Kesehatan Primer	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		4. Kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Kesehatan gigi dan mulut di Rumah Sakit	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		6. ICD 10, Destistry dan Stomatology	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		7. Infeksi menular lewat transfusi darah	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		8. Penyakit mulut di tingkat primer	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		9. Pembiayaan Darah	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		10. Penggunaan Darah Rasional	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		11. Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Darah	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		12. Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil, sangat terpencil dan kepulauan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>13. Akreditasi Puskesmas</p> <p>14. Puskesmas Berpretasi</p> <p>B. Upaya Kesehatan Rujukan</p> <p>1. Pelayanan kesehatan Rujukan</p> <p> a. Rumah Sakit Bergerak</p> <p> b. Rumah Sakit Pratama</p> <p> c. Rumah Sakit Publik</p> <p> d. Rumah Sakit Privat</p> <p> e. Rumah Sakit Khusus</p> <p>2. Pelayanan Kedokteran, Organisasi Profesi dan Konsorsium Upaya Kesehatan</p> <p> (KUK)</p> <p>3. Pelayanan Rumah Sakit Privat</p> <p> a. Akses Pelayanan SPGDT Call 119</p> <p> b. Akses Pelayanan Rekayasa Jaringan dan Sel Punca</p> <p> c. Pelayanan Geriartri</p> <p> d. Pelayanan Medical Tourism</p>	<p>Terbatas</p> <p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p>	<p>tertutup</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		8. Badan Pengawas di Rumah Sakit	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
		9. Perizinan dan Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas A dan (Penanam Modal Asing)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
		PMA a. Usulan Penetapan atau Peningkatan Kelas dari Pemilik RS atau Pimpinan Badan Hukum Rumah Sakit b. Rekomendasi Dinas Kesehatan Provinsi c. Profil dan data Rumah Sakit 3 (tiga) Tahun Terakhir d. <i>Self Instrumen Assesment</i> sesuai dengan kelas yang diajukan e. Keputusan Penetapan Kelas (Jika peningkatan kelas) f. Sertifikat Lulus Akreditasi (Jika Peningkatan Kelas)					
		10. Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lain	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
		a. Akreditasi Rumah Sakit Standar Internasional (JCI)					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		d. Prasarana Ruang Gawat Darurat e. Prasarana Ruang Operasi f. Prasarana Ruang Perawatan Intensif g. Prasarana Ruang Rawat Inap h. Prasarana Ruang Rehabilitasi Medik i. Prasarana Ruang Instalasi Sterilisasi Sentral (CSSD) j. Prasarana Ruang yang Aman dalam situasi darurat dan bencana k. Prasarana Instalasi Penyediaan Air Bersih untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan l. Prasarana Instalasi Pengolahan Air Limbah pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan m. Prasarana Rumah Sakit Keselamatan Jiwa n. Prasarana Rumah Sakit Sistem Instalasi Gas Medik dan Vakum Medik o. Prasarana Rumah Sakit Sistem Instalasi Tata Udara p. Prasarana Rumah Sakit Sistem Proteksi Kebakaran Aktif 6) Peralatan Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan a. Kalibrasi BPFK/LPFG/UPFK b. Kalibrasi Rumah Sakit c. Kalibrasi Puskesmas d. Pemeliharaan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit e. Pemeliharaan Peralatan Kesehatan Puskesmas 7) Aplikasi Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK) a. ASPAK Rumah Sakit b. ASPAK Puskesmas c. ASPAK Dinas Kesehatan Kabupaten E. Kesehatan Jiwa	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
			Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		1) Kesehatan Jiwa di Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan a. Kesehatan Jiwa di Desa Siaga b. Kesehatan Jiwa di Desa c. Kegawatdaruratan Psikiatrik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (Desa dan sekolah) d. Promosi Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (desa dan sekolah)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
		2) Bina Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan a. Layanan Unggulan di RSUD (Poli Jiwa dan instalasi kesehatan jiwa) dan Puskesmas b. Rehabilitasi Psikososial di RSUD (Poli Jiwa dan instalasi kesehatan jiwa) dan Puskesmas c. Indikator Mutu RSUD (Poli Jiwa dan Instalasi kesehatan jiwa) dan Puskesmas d. Mutu Layanan Jiwa di RS Jiwa dan RSUD sesuai penyelenggaraan RS	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		3) Etikolegal dan Asesmen	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		4) Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Narkotika Psikotropika dan zat adiktif, rokok, dan alkohol a. Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) b. Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gangguan Penggunaan Alkohol c. Wajib Lapor Pecandu Narkotika d. Pencegahan Masalah Akibat Penggunaan Tembakau	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>5) Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko</p> <p>a. Kesehatan Jiwa di Sekolah</p> <p>b. Kesehatan Jiwa dan Dukungan Psikososial Penanggulangan Bencana</p> <p>c. Penanggulangan Autisme</p> <p>d. Kesehatan Jiwa pada Kelompok Berisiko</p> <p>e. Psikologi Awal (PFA) bagi petugas siaga bencana</p> <p>3. PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN</p> <p>A. Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra</p> <p>1) Surveilans dan Respon Kejadian Luar Biasa (KLB)</p> <p>a. Difteri</p> <p>b. Polio</p> <p>c. Penyelenggaraan Kegiatan Survei Pre TAS filariasis</p> <p>d. Surveilans influenza</p> <p>e. Keracunan Pangan</p> <p>2) Imunisasi</p> <p>a. Pekan Imunisasi Nasional</p> <p>b. Coldchain bagi petugas imunisasi</p> <p>c. Introduksi imunisasi DPT-HB-HIB pada bayi dan balita</p> <p>d. Imunisasi bagi petugas kesehatan</p> <p>e. Imunisasi di daerah sulit</p> <p>f. Imunisasi TT bagi wanita usia subur</p> <p>g. Imunisasi bagi masyarakat umum</p> <p>h. Vaksin dan serum program imunisasi, pencaanangan vaksin baru DPT-HIB-Hib</p> <p>i. Imunisasi Campak, Polio, Difteri, TT,DPT,Pertusis,Tetanus dan HIB B/Haemo philis Influenza tipe B</p>	<p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p>	<p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p>	<p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p>	<p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		3) Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan 4) Kesehatan Matra <ul style="list-style-type: none"> a. Mudik Sehat b. Kesehatan bagi Penumpang Darat, Penumpang Kapal Laut dan Penumpang Pesawat Udara c. Kesehatan Migran d. Upaya Kesehatan Penyelaman dan Hyperbarik e. Penanggulangan Kesehatan akibat gangguan Kamtibmas f. Kesehatan Trasmigrasi bagi tenaga kesehatan B. Pengendalian Penyakit Menular Langsung <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengendalian Tuberkulosis <ul style="list-style-type: none"> a. Pengendalian Penyakit TB b. TB Multi Drug Resitance, TB, DOTS, WARSOS TB, TB Anak, TB HIV, Keperawatan TB c. Laboratorium TB 2) Pengendalian AIDS dan Penyakit Menular Seksual <ul style="list-style-type: none"> a. Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP)/ <i>Integrated Bio-Behavioural Surveillance</i> (IBBS) b. <i>Human Immuno Deficiency Virus (HIV)</i> c. Infeksi Menular Seksual (IMS), Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP), Konseling dan Test d. Obat <i>Anti Retro Viral (ARV)</i> dan reagen tes HIV 	Biasa/terbuka Biasa/terbuka Biasa/terbuka Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal	Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		3) Pengendalian Infeksi Pengendalian Saluran Pernafasan Akut <ul style="list-style-type: none"> a. Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus (MERS CoV) b. Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		4) Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan <ul style="list-style-type: none"> a. Diare b. Tifoid c. Hepatitis 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		5) Pengendalian Kusta dan Frambusia <ul style="list-style-type: none"> a. Kusta b. Frambusia c. Aliansi Nasional Eliminasi Kusta dan Frambusia (ANEK) 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		C. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang					
		1) Pengendalian Malaria <ul style="list-style-type: none"> a. Kelambu berinsektisida (LLINs) b. Eliminasi malaria c. Crosschecker mikroskopis malaria 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		2) Pengendalian Arbovirolesi <ul style="list-style-type: none"> a. DBD b. Chikungunya c. Ebola 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		3) Pengendalian Zoonosis <ul style="list-style-type: none"> a. Penyakit flu burung b. Vaksin Anti Rabies (VAR) baru c. Penyakit Pes d. Penyakit flu baru Hemagglutinin tipe 1 dan Neuraminidase tipe 1 (H.1.N.I) 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		4) Pengendalian Filariasis dan Kecacingan <ul style="list-style-type: none"> a. Filariasis b. Kecacingan c. Schistosomiasis 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		5) Pengendalian Vektor	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		D. Pengendalian Penyakit Tidak Menular					
		1) Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah <ul style="list-style-type: none"> a. Penyakit Jantung b. Penyakit Pembuluh Darah c. Penyakit Hipertensi d. Penyakit Stroke 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		2) Pengendalian Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik <ul style="list-style-type: none"> a. Penyakit Diabetes Mellitus b. Penyakit gangguan metabolik c. Penyakit gangguan tiroid d. Gangguan Obesitas 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		3) Pengendalian Penyakit Kanker 4) Pengendalian Penyakit Kronis dan Generatif a. Penyakit akibat produk tembakau b. Asma, Lupus, Thalassemia 5) Pengendalian Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan a. Pengendalian Cidera b. Pengendalian Kecelakaan Lalu Lintas c. Penanganan Kesehatan akibat Tindak Kekerasan E. Penyehatan Lingkungan 1) Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar a. Pengawasan kualitas air minum b. Sanitasi total berbasis masyarakat 2) Penyehatan Pemukiman dan Tempat-Tempat Umum a. Higiene sanitasi dan Bangunan umum b. Dampak perubahan iklim terhadap kesehatan c. Pengendalian faktor resiko di rumah dan tempat umum	Biasa/terbuka Biasa/terbuka Biasa/terbuka Biasa/terbuka Biasa/terbuka Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal	Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>3) Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat</p> <p>a. Penanggulangan kedaruratan bidang Kesehatan Lingkungan b. Fasilitas Kesehatan Masyarakat di daerah terpencil perbatasan kepulauan c. Pelabuhan Sehat, Pasar Sehat, dan Kota Sehat d. Penyehatan kawasan dan sanitasi dasar</p> <p>4) Higiene Sanitasi Pangan</p> <p>a. Makanan jajanan b. Restoran/Rumah makan c. Jasa Boga d. Depot air minum</p> <p>5) Pengamanan Limbah, Udara, dan Radiasi</p> <p>a. Medis Fasyankes b. Limbah Medis c. Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) d. Pengamanan Dampak kesehatan radiasi non pengion</p> <p>F. Pengembangan dan Penapisan Teknologi Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan</p>	<p>Terbatas</p> <p>Biasa/terbuka</p> <p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>tertutup</p> <p>Terbuka</p> <p>tertutup</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>1) Pengembangan Teknologi dan Laboratorium</p> <p>a. Laboratorium Pengendali Penyakit b. Laboratorium Kesehatan Lingkungan c. Laboratorium Kesehatan Matra d. Model dan Teknologi Tepat Guna e. Uji kendali mutu dan kalibrasi f. Pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan pada instalasi</p> <p>G. Sertifikasi Sanitasi Kesehatan dan Pengujian Kesehatan</p>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
		<p>1) Ship Sanitation</p> <p>a. Ship Sanitation Control Exemption of Certificate (SSCEC) b. Ship Sanitation Control of Certificate (SSCC) c. Sertifikat Pengawasan Obat/Alat P3K Kapal</p>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>2) Sertifikat</p> <p>a. Health Certificate b. International Certificate of Vaccination c. Surat Keterangan Pengujian Kesehatan Nahkoda/Pilot dan Anak Buah Kapal/ Pesawat Udara d. Sertifikat Air Bersih e. Sertifikat Penyelenggaraan Perusahaan Fumigasi di Kapal f. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga g. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan h. Rekomendasi hasil uji laboratorium rujukan</p> <p>4. GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK A. Gizi</p> <p>1) Gizi Makro</p> <p>a. Gerakan Nasional Sadar Gizi dalam rangka percepatan perbaikan gizi (1000 HPK, Stunting) b. Pemantauan Pertumbuhan Anak (posyandu)</p> <p>2) Gizi Mikro</p> <p>a. Upaya penanggulangan masalah gizi mikro b. Manajemen Taburia c. Upaya penanggulangan masalah gizi mikro lainnya</p>	<p>Terbatas</p> <p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p>	<p>tertutup</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		3) Gizi Klinik dan Dietetik <ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Gizi di Puskesmas, Rumah Sakit, dan Instansi b. Tata Laksana Anak Gizi Buruk c. Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Lebih 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		4) Konsumsi Makanan dan Jasa Makanan <ul style="list-style-type: none"> a. Makanan Pendamping ASI b. ASI Eksklusif c. Pedoman Gizi Seimbang d. Makanan Bayi dan Anak e. Buffer Stock Makanan Pendamping ASI f. Makanan Tambahan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis dan Balita Gizi Kurang g. Makanan Tambahan Anak Sekolah 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		5) Kewaspadaan Gizi <ul style="list-style-type: none"> a. Surveilans Gizi b. Epidemiologi Kasus Gizi Buruk c. Penanganan Bidang Gizi dalam Situasi Bencana d. Jejaring Informasi Pangan dan Gizi 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		B. Kesehatan Ibu <ul style="list-style-type: none"> 1) Kesehatan Ibu Hamil <ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Antenatal Terpadu b. Pelayanan Kelas Ibu Hamil c. Pencegahan Penularan HIV AIDS dari ibu ke anak (PPIA) 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>2) Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas</p> <p>a. Kemitraan Bidan dan Dukun b. Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) c. Supervisi Fasilitatif</p> <p>3) Kesehatan Maternal dengan Pencegahan Komplikasi</p> <p>a. Audit maternal Perinatal b. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)/Pemberdayaan Masyarakat c. Tanda Bahaya pada Kehamilan d. Surveilans Kematian Ibu</p> <p>4) Keluarga Berencana</p> <p>a. Pelayanan KB Pasca Persalinan b. Pelatihan KB Pasca Persalinan</p> <p>5) Perlindungan Kesehatan Produksi</p> <p>a. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu (PKRT) b. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana (Paket Pelayanan Awal Minimal/PPAM Kespro) c. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan d. Pengarus Utamaan Gender Bidang Kesehatan (PUGBK)</p> <p>C. Kesehatan Anak</p> <p>1) Kelangsungan Hidup Bayi</p>	<p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p>	<p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p>	<p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p>	<p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		1) Kesehatan Tradisional Keterampilan <ul style="list-style-type: none"> a. Akupresure b. Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional c. Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan di Fasyankes d. Pelayanan Tradisional Keterampilan Lainnya 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		2) Kesehatan Tradisional Ramuan <ul style="list-style-type: none"> a. Health Tourism b. Peningkatan Pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA) c. Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA) d. Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional e. Pelayanan Kesehatan Tradisional Ramuan di Fasyankes 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		3) Kesehatan Alternatif dan Komplementer <ul style="list-style-type: none"> a. Akupuntur b. Obat Herbal/Obat Tradisional c. Integrasi Yankestrad d. Pelayanan Alternatif Komplementer lainnya 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		4) Penapisan dan Kemitraan <ul style="list-style-type: none"> a. Sentra Penerapan dan Pengembangan Pengobatan Tradisional (SP3T) b. Kelompok Kerja Nasional Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer c. Penapisan Pengobat Tradisional Asing d. Kemitraan Pengobatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer e. Pengobat Tradisional (lokal) f. Asosiasi Pengobat Tradisional 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		E. Kesehatan Kerja dan Olahraga					

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		1) Pelayanan Kesehatan Kerja <ul style="list-style-type: none"> a. Penyakit Akibat Kerja b. Pemeriksaan Kesehatan Pekerja c. Pemeriksaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		2) Kapasitas Kerja <ul style="list-style-type: none"> a. Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif b. Kapasitas Kesehatan Kerja c. TP ASI 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		3) Lingkungan Kerja <ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Kesehatan Kerja di KKP b. K3 Perkantoran c. K3 Rumah Sakit d. K3 Puskesmas e. Biomonitoring Efek Kesehatan f. Review Pedoman Pengendalian Risiko Kesehatan 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		4) Kemitraan Kesehatan Kerja <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Jabfung Pembimbing Kesehatan Kerja b. Kesehatan Nelayan c. Integrasi Pos UKK d. Kabupaten/Kota Percontohan e. Penguatan Profesi 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		5) Kesehatan Perkotaan <ul style="list-style-type: none"> a. Kawasan Kumuh dan Miskin Perkotaan b. Forum Kota 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		6) Kesehatan Olahraga <ul style="list-style-type: none"> a. Kebugaran Jasmani bagi Karyawan/Pekerja b. Kebugaran Jasmani bagi Calon Jemaah Haji c. Kebugaran Jasmani bagi Usia Sekolah d. Olahraga bagi Ibu Hamil/Masa Nifas e. Olahraga bagi Usia Lanjut f. Pelayanan Kesehatan Olahraga Masyarakat 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		5. KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN <ul style="list-style-type: none"> A. Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Penyediaan, Pengelolaan, Analisis,Pemantauan dan Evaluasi) <ul style="list-style-type: none"> 1) Harga Obat Publik <ul style="list-style-type: none"> a. Harga Jual Obat Generik b. Harga Jual Obat Generik Berdagang c. Harga Eceran Tertinggi pada Label Obat 2) Pengadaan Obat <ul style="list-style-type: none"> a. Pengadaan Vaksin Reguler b. Obat Esensial c. Obat Pelayanan Kesehatan Dasar, Kabupaten Kota dan Nasional d. Obat Program Malaria e. Obat Program Kesehatan Anak f. Obat Program Kesehatan Ibu g. Obat Program Gizi 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
			Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		h. Obat Anti Tuberkolosis i. Obat Program Percepatan Pembangunan Kesehatan Tanah Papua (P2KTP) j. Obat dan Alat Kesehatan Haji Indonesia k. Obat Penderita Thalassemia l. Obat Psikotropika Generik m. Obat Anti Retro Viral 3) Perbekalan Kesehatan a. Gudang Farmasi b. Kelengkapan Gudang Obat dan Perbekalan Kesehatan c. Pemusnahan Obat, Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan d. Pengadaan Reagen Screening Darah e. Obat <i>Buffer Stock</i> f. Hasil <i>Stock Opname</i> Obat B. Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan 1) Alat Kesehatan a. Alat Kesehatan b. Kependium Alat Kesehatan c. Pelabelan Alat Kesehatan dan PKRT d. Post Market dan Surveillance Alat Kesehatan e. Produk Alat Kesehatan Elektromedik f. Produk Alat Kesehatan Non Elektromedik 2) Produsen dan Distributor Alat Kesehatan dan Obat a. Industri Farmasi b. Pedagang Besar Farmasi c. Pedagang Eceran Obat d. Penyalur Alat Kesehatan e. Toko Alat Kesehatan f. Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
			Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
			Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>3) Produk Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)</p> <p>a. Produk Diagnostik In Vitro</p> <p>b. Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)</p> <p>c. PKRT Klas III</p> <p>d. PKRT Klas I dan II</p> <p>e. Perusahaan Rumah Tangga PKRT</p> <p>f. Penggunaan Pestisida di Rumah Tangga</p> <p>g. Post Market & Surveillance PKRT</p> <p>C. Kefarmasian (Standarisasi, klinis, komunitas dan Obat Tradisional)</p> <p>1) Pelayanan Kefarmasian</p> <p>a. Visite untuk Apoteker</p> <p>b. Tanggung Jawab Apoteker terhadap Keselamatan Pasien (Patient Safety)</p> <p>c. Penulisan Resep</p> <p>2) Farmasi Klinik</p> <p>a. Pharmaceutical Care untuk Penyakit Arthritis Rematik</p> <p>b. Pharmaceutical Care untuk Penyakit Asma</p> <p>c. Pharmaceutical Care untuk Penyakit Flu Burung</p> <p>d. Pharmaceutical Care untuk Penyakit Hati</p> <p>e. Pharmaceutical Care untuk Penyakit Diabetes Mellitus</p> <p>f. Pharmaceutical Care untuk Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan</p> <p>g. Pharmaceutical Care untuk Penyakit Tuberculosis</p> <p>h. Pharmaceutical Care Lainnya</p> <p>i. Dispensing Sediaan Steril</p> <p>j. Pencampuran Obat Suntikan Penanganan Sediaan Sitostatika</p> <p>k. Pharmaceutical Care untuk Pasien Penyakit Jantung Koroner :Fokus Sindrom Koroner Akut</p>	<p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p>	<p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p>	<p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p>	<p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		3) Farmasi Komunitas <ul style="list-style-type: none"> a. Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas b. Kefarmasian di Rumah c. Kefarmasian untuk Pasien Pediatri d. Kefarmasian untuk Penyakit Malaria e. Farmasi di Rumah Sakit 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		4) Penggunaan Obat Rasional <ul style="list-style-type: none"> a. Obat Rasional b. Informasi Obat c. Kefarmasian untuk Terapi Antibiotik d. Pemantauan Terapi Obat 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		D. Produksi dan Distribusi Kefarmasian <ul style="list-style-type: none"> 1) Obat Tradisional <ul style="list-style-type: none"> a. Farmakope Indonesia b. Farmakope Herbal Indonesia c. Suplemen I Farmakope Indonesia d. Suplemen II Farmakope Indonesia e. Suplemen III Farmakope Indonesia f. Suplemen I Farmakope Herbal Indonesia g. Suplemen II Farmakope Herbal Indonesia h. Suplemen III Farmakope Herbal Indonesia i. Usaha Kecil Obat Tradisional j. Usaha Menengah Obat Tradisional k. Usaha Jamu Gendong l. Usaha Jamu Racik m. Farmakope Herbal Indonesia 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		2) Kosmetik dan Makanan <ul style="list-style-type: none"> a. kemandirian Pangan b. kosmetik bagi petugas c. Industri rumah tangga bagi petugas d. Makanan Jajanan Anak Sekolah e. Kodeks Kosmetika Indonesia f. Materia Kosmetika Bahan Alam Indonesia 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		3) Narkotika, Psikotropika, Prekursor Farmasi dan Sediaan Farmasi Khusus <ul style="list-style-type: none"> a. Narkotika dan Psikotropika b. Prekursor Farmasi c. Sediaan Farmasi Khusus d. Persetujuan Impor dan Ekspor e. Pelaksanaan Perizinan Import dan Eksport Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		4) Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat <ul style="list-style-type: none"> a. Indonesian Pharmaceutical Industry Directory 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		6. SURAT KETERANGAN, SERTIFIKASI DAN PERIJINAN <ul style="list-style-type: none"> A. Surat Keterangan 	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
		1) Surat Keterangan Special Acces Scheme (SAS)					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		2) Surat Keterangan Alat Kesehatan 3) Sertifikasi Produksi PKRT 4) Surat Keterangan PKRT B. Sertifikasi dan Perijinan 1) Sertifikasi Produksi Alat Kesehatan 2) Sertifikasi Sarana Distribusi Alat Kesehatan 3) Perijinan dan Pengawasan Alat Kesehatan 4) Perijinan Penyalur Alat Kesehatan 7. PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN A. Pencegahan, Mitigasi, Kesiapsiagaan 1) Pencegahan dan Mitigasi 2) Kesiapsiagaan B. Tanggap Darurat dan Pemulihan 1) Tanggap Darurat 2) Pemulihan C. Pemantauan dan Informasi 1) Pemantauan 2) Informasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
			Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
			Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
			Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		D. Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		E. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		8. PENGEMBANGAN DAN JAMINAN KESEHATAN					
		A. Tersedianya data NHA Setiap Tahun	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		B. Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		9. INTELIGENSIA KESEHATAN					
		A. Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Inteligensia Kesehatan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		1) Intelegensia Anak					
		2) Intelegensia Remaja, Dewasa, dan Lanjut Usia					
		B. Penanggulangan Masalah Inteligensia Kesehatan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		1) Inteligensia Akibat Gangguan Bawaan					
		2) Inteligensia Akibat Gangguan Degeneratif dan Sistem Persyarafan					
		10. KESEHATAN HAJI					

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>A. Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji 2) Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji Kab/Kota 3) Klaim Pelayanan Kesehatan di Embarkasi/Debarkasi atau KKP 4) Pelayanan Kesehatan Embarkasi 5) Rekrutmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 6) Rekrutmen Tenaga Musiman <p>B. Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Advokasi dan Kemitraan Pembinaan Kesehatan Haji 2) Kesehatan Haji di Kabupaten 3) Kesehatan Haji Terpadu 4) Pemeriksaan Jasa Boga Catering Jemaah Haji 5) Vaksinasi Jamaah Haji 6) Sanitasi Asrama Haji 7) Penyelenggaraan Kesehatan Haji <p>11. PROMOSI KESEHATAN</p> <p>A. Sarana Promosi Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Booklet 2) Poster 3) Leaflet 4) Pamflet 5) Lembar Balik 6) Selebaran 7) Buletin 8) Festival 9) Lomba 10) Pameran 11) Seminar 12) Iklan Layanan Masyarakat 	<p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p>	<p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p>	<p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p>	<p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>13. DATA DAN INFORMASI</p> <p>A. Statistik Kesehatan</p> <p>1) Statistik Derajat dan Upaya Kesehatan 2) Statistik Lingkungan dan Sumber Daya Kesehatan</p> <p>B. Analisis dan Diseminasi Informasi</p> <p>1) Analisis Data kesehatan 2) Diseminasi Informasi Kesehatan</p> <p>C. Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data Kesehatan</p> <p>1) Pengembangan Sistem Informasi 2) Bank Data</p> <p>14. PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN</p> <p>Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan meliputi Pengawasan Produk Terapeutik dan</p>	<p>Biasa/terbuka</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Biasa/terbuka</p>	<p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p>	<p>Terbuka</p> <p>tertutup</p> <p>tertutup</p> <p>Terbuka</p>	<p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>1. NAPZA, Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, dan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2) Penyiapan kebijakan 3) Perumusan dan penyusunan bahan 4) Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5) Penetapan dalam bentuk NSPK <p>2. PENGAWASAN PRODUK TERAPETIK DAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF</p> <p>A. Penilaian Obat dan Produk Biologi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penilaian Obat baru, Obat copy dan Produk Biologi <ol style="list-style-type: none"> a. Pra Registrasi <ul style="list-style-type: none"> - Hasil Pra Registrasi - Kajian/Laporan - Dokumen Paten - Hasil evaluasi Site Master File (SMF) b. Registrasi <ul style="list-style-type: none"> - Registrasi Obat Innovator termasuk dokumen terkait - Registrasi Obat Copy - Registrasi Ulang c. Uji Klinik <ul style="list-style-type: none"> - Protokol uji klinik - Inspeksi uji klinik 	<p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p> <p>Terbatas</p>	<p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p> <p>tertutup</p>	<p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>d. Persetujuan Registrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sertifikat Nomor Izin Edar (NIE) - Surat Persetujuan Perubahan - Registrasi NIE <p>e. Pengembalian NIE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen pengembalian NIE - Dokumen pencabutan NIE - Dokumen pembekuan NIE <p>2) Evaluasi Produk Terapetik Penggunaan Khusus</p> <p>a. Evaluasi Produk Klinik</p> <p>b. Surveilan Efek Samping Obat dan Alat Kesehatan</p> <p>B. Standardisasi Produk Terapetik dan Peralatan Kesehatan Rumah Tangga</p>	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>tertutup</p> <p>tertutup</p> <p>tertutup</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keterangan <i>Good Manufacture Practive</i> (GMP) - Sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOTB) yang diterbitkan - Sertifikat CPOTB yang dikembalikan 					
		2) Pemantauan pelaksanaan sampling dan evaluasi hasil sampling dan pengujian BB/ BPOM	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
		3) Pemantauan harga obat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
		4) Perizinan Industri Farmasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
		D. Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan Perbekalan kesehatan rumah tangga 1) Inspeksi dan Sertifikasi Distribusi Produk Terapetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga					

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>a. Inspeksi Sarana Distribusi Produk Terapetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah</p> <p>Tangga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan hasil pemeriksaan dari BB/BPOM - Laporan hasil pemeriksaan sarana distribusi oleh Pusat - Laporan Kasus - Laporan Tindak Lanjut Inspeksi 	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
		<p>b. Sertifikasi Sarana Distribusi Produk Terapetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah</p> <p>Tangga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ijin Pedagang besar farmasi dari Menkes/Dinkes Provinsi - Keterangan Importasi bahan baku obat-obat impor - SAS (Special Access Scheme) dari Direktorat Penilaian Obat dan Produk Biologi - Sertifikat Cara Distribusi Obat yang baik 	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>c. Penanggulangan Produk Ilegal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Edaran Produk Ilegal - Laporan Produk Ilegal dari BB/BPOM seluruh Indonesia - Laporan hasil pengujian produk ilegal dan PPOMN hasil lunder cover buy - Laporan penarikan produk ilegal dari BB/BPOM dan PBF/industri farmasi - Laporan Kasus 	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
		<p>2) Pengawasan promosi dan penandaan produk terapeutic dan perbekalan kesehatan</p> <p>rumah tangga</p> <p>a. Pengawasan promosi produk terapeutic dan perbekalan kesehatan rumah tangga</p> <p>b. Pengawasan penandaan produk terapeutic dan perbekalan kesehatan rumah tangga</p>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
		<p>3) Surveilance dan analisis risiko produksi terapeutic dan perbekalan kesehatan rumah</p> <p>tangga</p>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		a. Surveilan produksi terapeutik dan perbekalan kesehatan rumah tangga b. Analisis risiko produksi terapeutik dan perbekalan kesehatan rumah tangga E. Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif					
		1) Inspeksi Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (NPP) a. Laporan hasil pemeriksaan dan BAP NPP b. Tindak lanjut hasil pemeriksaan NPP c. <i>Proceeding</i> hasil pengawasan NPP	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
		2) Pengaturan dan sertifikasi NPP a. Sertifikat analisa hasil pengawasan NPP b. Surat persetujuan impor/ekspor (SPI-SPE) dari Kementerian Kesehatan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
		3) Pengawasan produk tembakau (rokok) a. Hasil Pengawasan iklan dan promosi rokok	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		b. Hasil Pengawasan produk rokok c. Proceeding hasil pengawasan rokok 3. PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLIMEN A. Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik					
		1) Persetujuan pendaftaran baru dan variasi OT dan suplemen kesehatan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
		2) Persetujuan pendaftaran ulang OT dan Suplemen Kesehatan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
		3) Notifikasi Kosmetika	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		4) <i>Master of Control Document</i> (Pencatatan NIE)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
		5) Obat Tradisional, kosmetik bermasalah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
		a. Pembatalan dan pengembalian Nomor Ijin Edar b. Pencatatan Pengembalian Berkas diloket c. Hasil Audit Sarana d. Surat Pengaduan Konsumen (ULPK)					
		6) Survelan Keamanan Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
		a. Surveilans keamanan obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik b. Surveilans keamanan kosmetik c. Riwayat Perusahaan Pendaftar iklan OT dan suplemen kesehatan					

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>7) Survelan Keamanan Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik</p> <p>a. Surveilans Keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Makanan b. Surveilans Keamanan Kosmetik</p> <p>B. Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk komplement</p> <p>1) Standardisasi OT dan suplemen makanan</p> <p>a. Peraturan pedoman dan standard</p> <p>b. Rancangan peraturan/pedoman/standard termasuk hasil kajian dan rekomendasi pakar</p> <p>c. Hasil Kajian/notulen/laporan</p> <p>d. Sosialisasi, Pelatihan</p> <p>- Laporan hasil pelatihan - Berkas yang berhubungan dengan kegiatan</p>	<p>Terbatas</p> <p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p>	<p>tertutup</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>e. Protokol dan dokumen uji klinik</p> <p>2) Standardisasi kosmetik</p> <p>a. Peraturan, pedoman dan standard</p> <p>b. Rancangan peraturan/pedoman/standard termasuk hasil kajian dan rekomendasi pakar</p> <p>c. Hasil Kajian/notulen/laporan</p> <p>d. Sosialisasi, Pelatihan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan hasil pelaksanaan - Berkas yang berhubungan dengan kegiatan 	<p>Terbatas</p> <p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p>	<p>tertutup</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>e. Protokol dan dokumen uji klinik</p> <p>3) Standardisasi Sarana Produk OT, Kosmetik dan suplemen makanan</p> <p>a. Peraturan, pedoman dan standard</p> <p>b. Rancangan Peraturan/pedoman/standard termasuk hasil kajian dan rekomendasi pakar</p> <p>c. Hasil Kajian/notulen/laporan</p> <p>d. Sosialisasi, Pelatihan</p> <p>- Laporan Hasil Pelaksanaan</p> <p>- Berkas yang berhubungan dengan kegiatan</p>	<p>Terbatas</p> <p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p>	<p>tertutup</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>e. Protokol dan dokumen uji klinik</p> <p>C. Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen</p> <p>1) Inspeksi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rekapitulasi Laporan Bulanan hasil pemeriksaan Balai/Balai Besar POM - Laporan hasil inspeksi - Laporan Tindak Lanjut Inspeksi <p>2) Sertifikasi Obat Tradisional Kosmetik dan Produk Komplemen</p> <p>a. Sertifikasi Kosmetik dan suplemen makanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keterangan impor dan ekspor - Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetika yang baik <p>b. Sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang baik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persetujuan penggunaan fasilitas bersama 	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>tertutup</p> <p>tertutup</p> <p>tertutup</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keterangan Good Manufacture Practice (GMP) - Sertifikat Cara Pembuatan Obat yang baik yang diterbitkan - Sertifikat Cara Pembuatan Obat yang baik yang dikembalikan <p>c. Sertifikasi Obat Tradisional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keterangan impor dan ekspor - Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang baik <p>D. Obat Asli Indonesia</p>					
		1) Hasil pengembangan Obat Asli Indonesia (OAI) (Media cetak dan/atau media elektronik)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
		2) Kajian Pengembangan OAI	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
		3) Sosialisasi dan diseminasi pengembangan OAI	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		4 PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA					

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>A Penilaian Keamanan Pangan</p> <p>1) Persetujuan pendaftaran pangan olahan 2) Pencabutan pendaftaran pangan olahan 3) <i>Master of control document</i> (Pencatatan NIE) 4) Variasi pendaftaran pangan olahan</p> <p>B Standardisasi Produk Pangan</p> <p>1) Bahan Baku dan Bahan Tambahan Pangan a. Bahan Baku b. Bahan Tambahan Pangan 2) Pangan Khusus a. Pangan Hasil Rekayasa Genetika dan Iradiasi b. Produk Pangan Fungsional 3) Pangan Olahan a. Produk Pangan b. Kodex Pangan</p>	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>tertutup</p> <p>tertutup</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>C Inspeksi dan Sertifikasi Produk Pangan</p> <p>1) Laporan hasil pemeriksaan sarana produksi distribusi 2) Laporan hasil pemeriksaan/pengujian produk pangan,label pangan dan iklan 3) Tindakanlanjut produk tidak memenuhi ketentuan (TMK) 4) Kasus Khusus terkait produk pangan 5) Laporan hasil audit verifikasi sarana produksi 6) Surat Persetujuan pencantuman label halal 7) Surat keterangan ekspor/impor 8) Sertifikasi hygiene sanitasi</p> <p>D Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan</p> <p>1) Surveilans dan Penanggulangan Keamanan Pangan 2) Promosi Keamanan Pangan 3) Penyuluhan Makanan Siap Saji dan Industri Rumah Tangga</p> <p>E Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya</p> <p>1) Standarisasi Produk dan Bahan Berbahaya</p> <p>a. Standardisasi Bahan Berbahaya Kimia dan Non Kimia b. Penilaian Risiko Produk dan Bahan Berbahaya</p> <p>2) Pengamanan Produk dan Bahan Berbahaya</p>	<p>Terbatas</p> <p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p>	<p>tertutup</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		a. Listing dan Penandaan Produk dan Bahan Berbahaya b. Surveilans Produk dan Bahan Berbahaya 3) Penyuluhan Bahan Berbahaya a. Penyuluhan Institusi dan Masyarakat b. Desiminasi Informasi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait

BUPATI BELITUNG TIMUR,

TTD

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULAH, S.H
NIP. 19710602 200604 1 005